

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gold Glory Gospel adalah istilah yang menggambarkan kemuliaan dan kemakmuran yang diharapkan dapat diraih melalui penyebaran Injil dan ajaran Kristus. Dalam konteks Gereja Katolik, konsep ini berkaitan dengan penerapan ajaran agama yang mendalam, yang tidak hanya mengarah pada penyelamatan jiwa, tetapi juga kemajuan dalam kehidupan sosial dan spiritual umat. Seiring dengan perkembangan Gereja Katolik, penerapan nilai-nilai ini terlihat dalam upaya gereja untuk memperbaiki kehidupan umat melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan karya amal, yang semuanya berakar pada semangat Injil yang membawa kemuliaan dan keberkahan bagi banyak orang..

Dalam misi Gerejawi diatas, Keuskupan Agung Semarang juga peduli dan ikut andil bagian dalam proses kenegaraan, khususnya peningkatan partisipasi politik masyarakat beragama Katolik. Hal ini didasari oleh “*Ensiklik Gaudium et Spes atau Konstitusi Gereja di Dunia Dewasa Ini*” adalah dokumen puncak dari Konsili Vatikan Kedua yang diresmikan Paus Paulus VI pada 7 Desember 1965. Dokumen tersebut berisi tentang kegembiraan dan harapan yang dialami oleh manusia di zaman ini terlebih kaum miskin dan yang menderita juga merupakan kegembiraan dan harapan para pengikut Kristus. Namun, pada *Gaudium et Spes* artikel 73, Gereja Katolik adanya dua aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni aspek hubungan politik kemasyarakatan dan iman Kristiani. Dikatakan di sana bahwa semua kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partai.

Gereja Katolik selalu menyebut dirinya bukan suatu institusi politik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan kehadiran Gereja memiliki muatan politis. Yang perlu diketahui ialah tugas kerasulan dan Gereja dalam bidang politik ada dalam tatanan moral dan iman. Kedua bidang ini memiliki dimensi dan muatan politis. Sehingga politik yang dimaksud di sini bukan politik kekuasaan melainkan politik yang bermoral dan beriman. Jika Gereja Katolik memberikan suatu pernyataan politis, lingkupnya ada dalam bidang moral. Hal itu berarti bahwa Gereja melakukan intervensi ke dalam kebebasan dan otonomi pribadi. Semua itu berangkat dari kesadaran akan tanggung jawab menjaga nilai-nilai moral kemanusiaan. Gereja Katolik selalu meningkatkan para politikus Katolik agar menyadari bahwa berpolitik itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Konteks atau makna “panggilan” dalam dokumen tersebut dimaksudkan Bapa Paus sebagai panggilan untuk melayani sesama. Maka, para politisi diharapkan untuk memiliki integritas diri, komitmen yang kuat, moralitas yang baik serta penggunaan kekuasaan sungguh-sungguh untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Para politisi juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kehidupan sosial dan politik, agar keterlibatan atau partisipasi politiknya bermakna bagi umat manusia. Sehingga, dokumen *Gaudium et Spes* menjadi acuan dan pedoman seluruh jajaran Gereja Katolik di Indonesia sebagai koridor atau batasan keterlibatan Umat Katolik dalam proses perpolitikan, tidak terkecuali partisipasi politik.

Tetapi, mengapa Gereja Katolik seakan-akan tertuntut untuk andil dalam kondisi perpolitikan di Indonesia. Hal ini didasari oleh makna Gereja yang tidak

dapat dipisahkan dari politik karena politik adalah bagian dari kehidupan sosial yang memengaruhi keadilan, kesejahteraan, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sebagai institusi yang memiliki peran spiritual dan sosial, gereja memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keadilan, membela kaum tertindas, serta mengawal kebijakan yang berpihak pada kebaikan bersama. Dalam sejarah, gereja sering kali menjadi motor penggerak perubahan sosial, seperti dalam perjuangan melawan kolonialisme, perbudakan, dan ketidakadilan ekonomi. Jika gereja bersikap apolitis, maka Gereja berisiko membiarkan ketidakadilan terus berlangsung tanpa ada suara profetik yang mengingatkan para pemegang kekuasaan. Gereja harus berpolitik bukan dalam arti menjadi alat kekuasaan atau partai tertentu, melainkan sebagai penjaga moralitas publik yang mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, dalam sistem demokrasi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan umat beragama, sehingga gereja perlu terlibat dalam wacana politik untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip moral yang diyakininya. Keterlibatan ini juga dapat mendorong pemimpin-pemimpin politik yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, gereja tidak boleh tinggal diam, melainkan harus aktif dalam politik dengan cara yang etis, kritis, dan bertanggung jawab demi membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

Partisipasi politik dalam organisasi kemasyarakatan bergulir dan berdinamika ditengah masyarakat Indonesia, khususnya Ormaskat Pemuda Katolik Kota Semarang periode 2024 - 2025. Pemilu bukan satu-satunya cara untuk

menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik paling mudah diukur melalui pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Hal ini sesuai dengan konsep partai politik karena partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Tanpa adanya partisipasi politik, maka akan menjadi suatu negara yang otoriter dimana penguasa dan kalangan elit politik saja yang akan menentukan arah hidup bangsa serta segala sesuatunya tanpa boleh satu orangpun, termasuk pemuka agama untuk mengubah atau menentang keputusan penguasa.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2020 mencapai 68,62 persen. Partisipasi sebanyak itu, lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada 2015 yakni mencapai 65 persen (Farasonalia, Riska, dkk. *kompas.com.2020*). Dan dapat dikatakan masih terbilang rendah. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana pentingnya partisipasi politik dan manfaat dari partisipasi politik bagi kehidupan bangsa, terutama upaya pengembangan pendidikan atau sosialisasi politik kepada masyarakat. Sehingga dengan ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia. Terkonsentrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Semarang untuk menghadapi pesta demokrasi dikemudian hari. Sehingga cara yang paling efektif adalah menggunakan pendekatan emosional melalui peran pemuka agam. Hal ini didasari kemajemukan

masyarakat dan adanya beberapa agama yang diakui di Indonesia. Kemudian didukung dengan tingginya kepatuhan atau social trust masyarakat Indonesia kepada pemuka agamanya.

Kemudian rendahnya partisipasi politik masyarakat beragama Katolik di Kota Semarang menjadi isu penting dan menjadi urgensi Gerejawi di seluruh dunia, karena dapat mempengaruhi representasi mereka dalam pengambilan keputusan publik. Sebagai bagian dari masyarakat yang plural, keterlibatan aktif umat Katolik dalam organisasi kemasyarakatan yang menjadi indikator kemajuan partisipasi politik. Dan partisipasi ini diperlukan untuk memastikan aspirasi, nilai dan kebutuhan komunitas mereka terakomodasi secara adil. Partisipasi yang rendah dapat mengurangi pengaruh mereka dalam membangun kebijakan inklusif, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesadaran politik dan pendidikan partisipatif untuk mendorong peran aktif dalam demokrasi yang lebih dewasa ini.

Sehingga, mengapa penulis mengambil tajuk peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pemuda Katolik, hal ini dikarenakan seorang pemegang otoritaria atau kekuasaan tertinggi dalam tahta pastor dalam sebuah wilayah secara eksplisit akan selalu ikut andil dalam proses perkembangan Gereja era modern, seperti berperan dalam menstimulan partisipasi politik orang muda Katolik. Uskup Agung selalu memiliki cara dalam meningkatkan partisipasi politik orang muda Katolik, entah melalui tuntutan ataupun konferensi kepada para Pastor di Gereja maupun level Kevikepan (otoritaria dibawahnya). Dan seorang Uskup Agung juga menjadi pemegang dan pengambil kebijakan dalam mewadahi para kaum muda dalam proses perpolitikan,

contohnya dengan memfasilitasi aspirasi politik dengan dibuatnya Organisasi Kemasyarakatan Katolik (ORMASKAT). Salah satu organisasi kemasyarakatan Katolik kaum muda dalam pengembangan minat politik adalah mengikuti Ormas Pemuda Katolik. Pemuda Katolik melalui program-programnya selalu menjawab dan mengkaji isu-isu politik masa kini yang sedang *trend* di masyarakat.

Indonesia saat ini menghadapi berbagai bentuk degradasi di bidang sosial, moral, kepercayaan, dan politik. Kekhawatiran atas situasi ini telah memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk kaum muda yang diakui sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda Katolik Peduli Politik, sebuah program Ormas Pemuda Katolik di bawah naungan Unit Pengembangan Pastoral Kemasyarakatan & Advokasi Keuskupan Agung Semarang, merasa prihatin terhadap degradasi yang terus melanda negeri ini. Pemuda Katolik berinisiatif mengajak kaum muda untuk belajar dan berperan aktif dalam mengatasi masalah ini. Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian dan partisipasi kaum muda dalam menghadapi dan mengatasi degradasi di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang partisipasi politik. Unit Pengembangan Pastoral Kemasyarakatan & Advokasi Keuskupan Agung Semarang pun mengajak peserta memahami dan merespon isu-isu yang meresahkan masyarakat saat ini. Komunitas Peduli Politik mengajak kaum muda Katolik di Keuskupan Agung Semarang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang relevan bagi kaum muda. Oleh karena itu, penulis merasa Pemuda Katolik menjadi subjek penelitian paling relevan guna mendukung penelitian ini, karena kompleksitas program maupun perannya dalam bidang perpolitikan orang muda Katolik di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam peningkatan partisipasi politik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Katolik di Kota Semarang periode 2024 - 2025?
2. Hambatan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Uskup Agung Semarang dalam peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menindaklanjuti seberapa penting peran pemuka agama Katholik khususnya Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko yang kerap disebut “Bapa Uskup” dalam proses peningkatan partisipasi politik organisasi kemasyarakatan Pemuda Katolik di wilayah hukum Kota Semarang periode 2024 -2025. Serta meninjau seberapa berpengaruh keterlibatan dan arahan Uskup Agung Semarang dalam memstimulan partisipasi politik Pemuda Katolik khususnya di Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi hambatan apa saja yang dialami Monsinyur Robertus Rubiyatmoko selaku Uskup Agung Semarang dalam mengimpresi partisipasi politik organisasi kemasyarakatan Pemuda Katolik periode 2024 – 2025 di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, meliputi;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan mampu berkontribusi secara positif bagi perkembangan disiplin keilmuan, wawasan, dan wacana pembaca mengenai seberapa berpengaruh peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam proses peningkatan partisipasi politik ormaskat Pemuda Katolik di Kota Semarang. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi beban referensi ataupun rujukan bagi penelitian lain dengan topik serupa.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengetahui realita Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam upaya meningkatkan partisipasi politik organisasi kemasyarakatan Katolik yakni Pemuda Katolik Kota Semarang periode 2024 – 2025. Nantinya, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi serta evaluasi bagi program kolaborasi pemerintah Kota Semarang dan otoritas Gerejawi agar kedepannya dapat melibatkan peran pemuka agama dalam rangka meningkatkan partisipasi politik warga Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Bagian pertama dari tinjauan pustaka ialah perspektif empiris melalui pemaparan beberapa kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian kedua selanjutnya adalah perspektif teoritis yang menguraikan beberapa dasar teori penelitian dan konsep kajian Ilmu Pemerintahan dengan menggunakan sudut pandang, model dan paradigma yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

1. “Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019.” Oleh Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., dan M. Arung Palaga.

Dalam tataran Negara Indonesia, Gereja Katolik Indonesia yang selama ini dipandang lamban merespon perkembangan politik dan pasif dalam menyikapi dinamika kehidupan politik serta dipandang tabu oleh sebagian masyarakat, sebab bukan ranah gereja Katolik mencampuri urusan politik, kini melibatkan diri dengan mengambil peranannya sebagai sebuah institusi keagamaan. Keprihatinan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang atas permasalahan yang terjadi tersebut melandasi peranannya sebagai sebuah kelompok yang berinstitusi keagamaan dengan memainkan peranannya melalui sebuah komisi yang bernama Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS) yang dibentuk oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Ignatius Suharyo pada tahun 1998. PK4AS sebagai sebuah komisi dibentuk untuk membantu tugas uskup dalam mengelola bidang kerasulan kemasyarakatan di tingkat keuskupan dan

memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada umat Katolik dengan tujuan mewujudkan kesadaran untuk ikut ambil bagian menjadi warga negara yang 100% Katolik dan 100% Indonesia yang berlandaskan kasih. Dalam konteks pemilu serentak tahun 2019, keterlibatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik semata-mata bukan untuk mempromosikan dirinya sendiri, melainkan suatu bentuk respon atas keprihatinannya terhadap kesadaran umat Katolik yang dinilai rendah untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya di bidang politik.

Pemilu serentak Tahun 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama dengan lima surat suara untuk memilih Presiden- Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD RI yang dinilai sulit dan cukup membingungkan, serta banyak terjadi fenomena politik identitas yang berkembang di masyarakat Indonesia, maka sebagai langkah dan sikap untuk memerangi hal tersebut, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang mengambil peranannya sebagai sebuah kelompok kepentingan dengan membangun kesadaran umat Katolik untuk menjadi pemilih yang beriman, cerdas, dan bijaksana sebagai perwujudan akan imannya dan rasa cinta tanah air Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang sebagai kelompok kepentingan dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya menjelang pemilu tahun 2019. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang yang merupakan tempat induk keuskupan yang menjadi domisili dari seorang Uskup Agung, pemimpin tertinggi di tataran gereja keuskupan.

A. Kebaharuan Penelitian

Perspektif peneliti diatas hanya mendalami seputar peran Uskup Agung Semarang sebagai tokoh besar Gerejawi yang menjawab urgensi Gereja yang diharuskan andil dalam dinamika berpolitik, sehingga peneliti melihat bahwasanya pendidikan politik dirasa menjadi terobosan utama dalam meredam pergolakan massa yang sekiranya akan terjadi pada Pemilihan Umum 2019. Sedangkan, penelitian saya menindaklanjuti kompleksitas peran Uskup Agung Semarang dalam stimulasi ataupun peningkatan partisipasi politik masyarakat Katolik Kota Semarang melalui Organisasi Kemasyarakatan yang salah satunya yakni Ormaskat Pemuda Katolik Kota Semarang. Sehingga, saya pun melihat adanya peran penting Monsiyur Robertus Rubiyatmoko dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Katolik tersebut. Serta melalui cara ataupun media apa Bapa Uskup berperan didalamnya.

2. “Strategi Gereja Katolik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik di Keuskupan Agung Semarang.” Oleh Dr. Dra. Fitriyah, M.A dan Alfonsus Ega Putra Warsanto

Agama melalui tokoh agama dan lembaga agama turut memiliki pengaruh dalam dunia politik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia, yang dirilis November 2018. Rilis survei tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan politik mencapai angka 51,7 persen. Agama Islam, sebagai agama dengan jumlah penganut terbanyak di Indonesia, telah banyak berpartisipasi dalam bidang politik di Indonesia, khususnya melalui berbagai ormas keagamaannya. Selain Agama Islam, agama lainnya memiliki pandangan

sendiri. Ajaran Kristen Protestan misalnya memandang politik sebagai salah satu sarana untuk membawa kedamaian di dunia. Agama Budhha yang memandang politik merupakan suatu penggunaan kekuatan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas. Sementara itu, Agama Hindu dalam memandang politik menekankan pada tujuan politik itu sendiri, dimana harus ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam Agama Konghucu, Agama menjadi dasar moralitas bagi setiap nilai dan tindakan politik. Politik tanpa berlandaskan moralitas keagamaan, atau moralitas ketuhanan merupakan hal yang “ditabukan” menurut pandangan Konghucu.

Selain kelima agama diatas, Agama Katolik memiliki sederet dokumen yang membahas mengenai politik dan partisipasi politik. Dokumen *Gaudium et Spes* no.75 menyatakan, Gereja hendaknya bekerjasama dengan negara untuk mencapai tujuan bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam politik pula, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik warganegara. Pimpinan Gereja tingkat lokal, di Keuskupan Agung Semarang, tampaknya cukup konsen dalam hal mendorong umatnya untuk terlibat lebih banyak dalam bidang politik. Hal ini tertuang dalam Arah Pastoral 2018, yang salah satu poin yang ditekankan ialah inklusif, yang berarti turut terlibat dalam usaha-usaha bersama membangun Gereja dan Bangsa. Keterlibatan untuk membangun bangsa salah satunya dilakukan melalui bidang politik. Dalam Arah Pastoral tersebut, Uskup Mgr. Rubiyatmoko, sebagai pemimpin Keuskupan Agung Semarang, turut menekankan pentingnya peran umat Katolik dalam politik, salah satunya melalui electoral activity, yaitu Pilkada 2018, Pemilu Legislatif dan

Pemilihan Presiden 2019. Sebagai Agama yang terorganisasi dari tingkat dunia hingga lingkungan, menjadi salah satu kemudahan bagi Gereja Katolik Indonesia untuk mendorong individu umat maupun organisasi masyarakat Katolik untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, terdapat beberapa hambatan untuk mendorong partisipasi politik umat, Pastor Sugihartanta, sebagai ketua komisi PK4AS, yang menangani bidang sosial-politik-kemasyarakatan, menyampaikan bahwa kesadaran politik rendah dan perasaan sebagai minoritas, menjadi hambatan untuk mendorong umat mau ikut berpartisipasi dalam politik.

B. Kebaharuan Penelitian

Peneliti tersebut menerangkan adanya strategi Gereja Katolik dalam meningkatkan partisipasi politik di Keuskupan Agung Semarang. Gereja Katolik Indonesia untuk mendorong individu umat maupun organisasi masyarakat Katolik untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, tidak seperti penelitian saya, peneliti tersebut tidak spesifik menjelaskan bahwasanya orotitaria Gereja dipegang oleh seorang Uskup Agung, sehingga peneliti sebelumnya tidak melihat bahwasanya pemimpin yakni Bapa Uskup yang berperan penting dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Katolik di Kota Semarang.

3. “Gereja dan Pafrtisipasi Politik.” Oleh Abu Bakar, dan Muh. Wahyu.

Indonesia yang telah mengamini demokrasi sebagai sistem ideal dalam menjalankan kekuasaan negara, tentu membutuhkan partisipasi warga negara dalam mengelola urusan- urusan publik. Karena itu partisipasi politik warga negara merupakan keharusan dan semua elemen perlu terlibat dalam

memperkuat sistem demokrasi, tidak terkecuali institusi agama. Walau partisipasi politik dibayangkan sebagai hak warga negara, namun pada kenyataannya masih banyak warga negara yang memilih untuk tidak berperan dalam proses politik demokrasi. Keengganan warga negara mengambil peran dalam proses politik tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kekecewaan warga negara terhadap pejabat yang tidak becus mengurus urusan publik atau sikap tercela politikus yang dianggap menyimpang dari harapan warga. Di samping itu, akses terhadap informasi politik yang tidak memadai juga dapat memicu absennya partisipasi warga negara dalam proses politik. Biasanya keterbatasan informasi politik yang diperoleh oleh warga negara dikarenakan sosialisasi politik yang tidak maksimal. Begitupun juga tidak maksimalnya kerja-kerja institusi demokratik seperti partai politik untuk mendorong animo masyarakat agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Selain itu, kesadaran masyarakat berkenaan dengan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi juga menjadi kendala. Tentunya untuk mendorong partisipasi politik masyarakat, semua elemen harus bersinergi. Tidak hanya aktor-aktor demokratik formal, akan tetapi dibutuhkan keterlibatan aktor lain seperti institusi agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas-komunitas lainnya. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana peran aktor-aktor tersebut dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Hanya saja, penelitian ini akan fokus melihat peran dan upaya institusi Gereja dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat di Kota Makassar. Pelibatan institusi agama di dalam kerjakerja demokratis tentu memiliki kendala pada tingkat tertentu, namun juga berguna pada sisi yang lain. Pandangan sebagian pemeluk agama yang memisahkan antara dunia

agama dan politik tentunya menjadi kendala karena berbenturan dengan pemahaman teologis mereka. Akan tetapi ketika institusi agama ikut mengambil bagian, justru akan mendorong ketertarikan pengikutnya untuk terlibat dalam politik sebagai perjuangan suci demi kemaslahatan umat.

C. Kabahuruan Penelitian

Penelitian diatas hanya mendefinisikan hubungan antara Gereja dan konteks partisipasi politik, yang saya rasa gambaran peneliti masih terlalu umum dan tidak menjurus kepada pokok bahasan yang menjadi sub penelitian. Sehingga, penelitian saya membahas secara spesifik dan aktual yakni Peran Uskup Agung Semarang yang dalam hal ini masih dipimpin oleh Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam peningkatan partisipasi politik salah satu Organisasi Kemasyarakatan Katolik yakni Pemuda Katolik Kota Semarang periode 2024 – 2025.

Melihat penulisan dan perspektif peneliti dalam ketiga penelitian terdahulu diatas, saya melihat adanya beberapa kelemahan mengenai siapa aktor yang berperan secara aktif dalam karya perpolitikan di lingkungan Gerejawi, khususnya Keuskupan Agung Semarang. Dan melalui penulisan diatas, saya hanya melihat pengaruh Gereja atau Keuskupan Agung Semarang sebagai sebuah organisasi struktural dalam perpolitikan di Indonesia. Tidak membahas siapakah tokoh yang secara dominan sering memberikan pandangan moral dan etika terhadap kebijakan politik untuk membimbing masyarakat dan pemimpin yang menggerakkan roda perpolitikan dan partisipasi politik masyarakat atau Umat Katolik di wilayah Kota Semarang.

Beberapa penelitian terdahulu tidak membahas secara spesifik hambatan yang dialami Gereja Katolik dalam sudut pandang sosial politik,. Namun hanya melihat dan merubah pola pikir masyarakat beragama Katolik agar lebih paham terhadap pendidikan politik dan mau terjun ke dunia

politik. Belum dibahas pendekatan-pendekatan secara eksplisit atau strategi apa saja yang dilakukan Gereja Katolik untuk meningkatkan minat, pemahaman politik dan potensi Umat Katolik agar berpartisipasi aktif dalam kancah perpolitikan. Kemudian, regulasi dan kebijakan apa yang dibuat Gereja Katolik dalam menanggapi iklim atau situasi politik saat ini. Perlu dicatat bahwasanya keterlibatan pemuka agama khususnya Uskup Agung Semarang dalam politik sering dirasa kontroversial dan memunculkan pertanyaan tentang pemisahan agama dan negara serta potensi penyalahgunaan agama untuk kepentingan publik. Karena saya merasa kehadiran Bapa Uskup selaku Pemimpin Tertinggi Keuskupan Agung Semarang sebagai pelayan umat dan teladan bagi masyarakat, juga petunjuk arah Umat Katolik dalam membangun masyarakat yang berkualitas, bermutu unggul dan berdaya saing politik. Sehingga melalui penelitian ini, akan dilakukan penelitian dan riset yang mendalam mengenai Peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pemuda Katolik di Kota Semarang.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Peran

Teori peran (Role Theory) berasal dari dunia theater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu. Dalam teori peran ini juga dikenal dengan istilah posisi peran (Role Position) Itu artinya adalah sekelompok orang yang memperhatikan atribut dan perilaku

yang sama. Dalam setiap role position terkandung istilah role expectation atau harapan-harapan tertentu pada suatu peran yang artinya keyakinan tentang serangkaian perilaku layak, kewajiban, hak-hak, dan keistimewaan yang ditunjukkan kepada posisi peran tertentu. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

1.6.2 Teori Peran Pemuka Agama

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, Soerjono. 2002). Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan, peran pemuka agama adalah peran yang diemban oleh tokoh agama dalam masyarakat, seperti sebagai pemimpin, pendakwah, dan teladan. Peran ini bertujuan untuk mengajak dan memberi contoh yang baik kepada umat beragama. (Rizqi, Muhammad. 2015). Sehingga, peran pemuka agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai lini sosial masyarakat, tidak terkecuali politik.

1.6.2.1 Teori Peran Pemuka Agama dalam Politik

Jika diperjelas perihal peran pemuka agama terhadap kondisi perpolitikan menjadi sedikit berbeda dengan peran pemuka agama sebelumnya. Menurut Max Weber (1922) dalam konsepnya tentang otoritas karismatik menjelaskan bahwa pemuka agama seringkali memiliki

legitimasi politik karena dianggap memiliki otoritas moral dan spritual yang kuat. Pemuka agama dianggap mempunyai kemampuan luar biasa dalam menafsirkan ajaran agama dan memberikan bimbingan moral serta politik. Weber juga berpendapat bahwa agama mempengaruhi etika politik, misalnya etika protestan dan semangat kapitalisme yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama membentuk perilaku ekonomi dan politik masyarakat. Kemudian, pemimpin agama seringkali menjadi penggerak perubahan politik, tetapi setelah itu, sistem pemerintahan cenderung bergeser ke otoritas rasional-legal yang lebih birokratis dan berlandaskan hukum. Sehingga, Weber menunjukkan bahwa pemuka agama memiliki pengaruh besar dalam politik, terutama melalui otoritas karismatik dan pembentukan etika politik. Namun, dalam perkembangannya lebih lanjut, kepemimpinan berbasis karisma seringkali mengalami institusionalisasi ke dalam sistem yang lebih rasional dan birokratis.

1.6.3 Teori Hubungan Agama dan Negara

a. Paradigma Integralistik

Paradigma ini memandang agama dan negara sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau terhubung satu sama lain, dimana fokus bahasan agama didalamnya juga mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan negara dan politik. Sementara itu, negara di pandang sebagai suatu lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Dalam studi serupa, paradigma integralistik dipandang sebagai konteks kajian toleransi umat beragama, dimaknai sebagai konsep da hubungan antar umat beragama yang toleran. Upaya mewujudkan toleransi umat beragama memerlukan

kerjasama, atensi dan peran seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah dan pemuka agama.

b. Paradigma Simbiotik

Paradigma ini melihat seberapa jauh antara agama dan negara memiliki hubungan yang saling memerlukan dan memberikan dampak timbal balik. Dengan adanya negara, agama dapat berkembang di wilayah tertentu. Begitu pula dengan adanya agama, negara memiliki suatu panduan atau tuntutan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, secara singkat agama memerlukan negara karena negara, agama dapat berkembang demikian pula sebaliknya.

c. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini muncul dan menimbang rasionalitas intelektual manusia mampu memunculkan tuntutan di berbagai aspek ekonomi, sosial budaya, hingga politik tanpa memerlukan turunya wahyu Tuhan. Maka manusia memulai membangun beberapa bentuk ilmu humaniora, seperti hukum, pengetahuan alam, dan etika tanpa bantuan Tuhan maupun agama. Dan dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan antara agama dan negara. Negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pada kerangka teori ini, penulisan akan difokuskan pada landasan konseptual yang mendukung penelitian. Hal ini mencakup teori-teori yang relevan, definisi konsep serta hasil penelitian terdahulu yang dikemas dan disempurnakan.

1.7.1 Kerangka Konseptual

1. Agama

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyepakati adanya beberapa agama yang diakui dalam institusi, yakni Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwasanya agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sehingga, agama Katolik menjadi salah satu agama yang diakui oleh negara. Dan seluruh hak yang diperoleh Umat Katolik di Indonesia dilindungi oleh undang-undang.

2. Gereja Katolik

Gereja Katolik hadir di dalam sebuah negara dan di tengah-tengah masyarakat juga memiliki muatan politis. Gereja Katolik sebagai institusi keagamaan yang besar dan berpengaruh, memang seringkali bersuara dalam isu-isu sosial, ekonomi, dan politik demi mewujudkan keadilan sosial, dan perdamaian martabat manusia. Muatan politis bukan berarti mendukung partai atau rezim tertentu, tetapi menyuarakan nilai-nilai Injil yang bersinggungan dengan kebijakan publik. Sehingga, muatan politis yang dimaksud bukan dalam arti politik praktis atau partisan, namun ajaran sosial yang berakar dalam iman dan spiritual karena menyangkut tatanan masyarakat. Prosesi pengambilan data guna mendukung penelitian dan penulisan skripsi ini akan dilaksanakan beberapa metode pengambilan data. Metode yang akan ditempuh oleh peneliti yakni melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber terkait di lingkungan Gerejawi yang menaungi

bidang sosial politik kemasyarakatan dari level daerah hingga kelevel yang lebih rendah.

3. Uskup Agung Semarang

Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko sebagai pemuka agama dan pemimpin tertinggi otoritas Gerejawi di wilayah Kota Semarang juga bertugas mendinamisir seluruh agenda ataupun kegiatan yang berhubungan langsung dengan Umat Katolik. Tidak menutup kemungkinan partisipasi beliau dalam aspek perpolitikan. Perutusan imamat yang beliau ilhami hingga detik ini adalah peran aktif secara langsung dalam perpolitikan, namun secara eksplisit peran Bapa Uskup dalam kondisi perpolitikan di Kota Semarang cukup terasa. Khususnya kepada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Katolik Kota Semarang.

4. Pemuka Agama

Pemuka agama adalah individu yang memiliki otoritas keagamaan dalam komunitasnya dan bertugas memberikan bimbingan spiritual, etika, serta sosial. Masyarakat memiliki ekspektasi terhadap bagaimana pemuka agama harus bertindak dalam menyikap beberapa kondisi tertentu, yakni konflik, dan pandangan politik dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan, teori peran (role theory) merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu menjalankan perilaku tertentu sesuai dengan posisi-posisi sosial yang mereka miliki dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks ini, setiap individu diharapkan memainkan “peran” tertentu yang disesuaikan dengan harapan masyarakat terhadap posisi sosial mereka. Teori peran

membantu menjelaskan bagaimana pemuka agama menavigasi posisi mereka dalam masyarakat berdasarkan ekspektasi sosial, nilai-nilai agama, serta tantangan zaman. Pemahaman ini penting untuk menganalisis dinamika sosial—politik-keagamaan dalam masyarakat yang plural.

5. Pemuda Katolik

Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Semarang adalah wadah pergerakan sosial kemasyarakatan ataupun muara perkumpulan Kaum Muda Katolik yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan dibawah naungan Otoritas Gerejawi Semarang dan Kesbangpol Kota Semarang. Penelitian ini juga diperkuat dengan analisis anggota Pemuda Katolik melalui Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik, apakah peran Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam Peningkatan Partisipasi Politik memang terasa hingga kepada anggota yang tergabung dalam Ormas Pemuda Katolik. Hal ini juga diperkuat dengan dokumen Gerejawi sebagai pelengkap dan mendukung keabsahan data yang peneliti peroleh. Sehingga, nantinya didapatkan jawaban yang aktual untuk menjawab rumusan masalah perihal peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik di Kota Semarang periode 2024-2025, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bapa Uskup dalam perannya meningkatkan partisipasi politik.

1.7.2 Kerangka Berpikir

1.7.2.1 Peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko

Peran adalah fungsi atau kontribusi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu konteks tertentu. Dalam hal ini, peran Uskup Agung sebagai pemimpin Gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang dan di wilayah administratif Kota Semarang tentunya memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang politik kemasyarakatan. Peran Uskup Agung diukur dari bentuk keterlibatannya dalam membimbing, mengedukasi, dan memotivasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Semarang terkait aspek perpolitikan. Adapun beberapa klasifikasi dari Peran Bapa Uskup, antara lain :

1. Peran Edukatif; Khotbah atau Homili (dalam bahasa Gerejawi) tentang pentingnya keterlibatan politik dan pengajaran atau penyuluhan seputar politik etis dan demokrasi.
2. Peran Motivasional; Dukungan moral atau spiritual kepada Pemuda Katolik yang ingin terlibat dalam politik dan afirmasi terhadap partisipasi politik sebagai bentuk panggilan iman.
3. Peran Fasilitatif; Menyediakan forum atau ruang diskusi politik (misalnya seminar, dialog, dll.). Serta kolaborasi dengan Organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik atau OMK.
4. Peran Advokatif; Pernyataan publik atau pastoral yang mendorong partisipasi politik dan menyuarakan pentingnya kehadiran Katolik dalam ruang publik.

1.7.2.3 Partisipasi Politik Pemuda Katolik

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas yang bertujuan mempengaruhi keputusan politik. Partisipasi politik Pemuda Katolik diukur dari bentuk keterlibatan mereka dalam proses politik formal maupun non-formal. Beberapa keterlibatan atau konteks partisipasi Pemuda Katolik Kota Semarang yang dimaksud, antara lain :

1. Keterlibatan dalam pemilu; Tingkat partisipasi dalam pemilihan umum. Serta menjadi relawan atau panitia pemilu.
2. Keterlibatan dalam organisasi politik atau sosial; Bergabung dengan partai politik atau organisasi sayapnya dan aktif dalam organisasi pemuda yang bergerak di bidang advokasi.
3. Kegiatan politik non-formal; Diskusi atau forum politik dan kampanye sosial atau gerakan digital (media sosial).
4. Kesadaran politik; Pengetahuan tentang isu politik lokal/nasional. Kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjabarkan dan mengulas secara detail peran-peran Uskup Agung dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pemuda Katolik di Kota Semarang periode 2024 - 2025. Penelitian kualitatif ini menjadi suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci, studi pustaka dan pandangan responden yakni Bapa Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus

Rubiyatmoko. Penelitian ini mewujudkan penelitian kualitatif dengan menggambarkan dan menafsirkan suatu kejadian dan realita sosial secara ilmiah yang terjadi pada masyarakat khususnya organisasi kemasyarakatan Pemuda Katolik di Kota Semarang untuk mendukung penelitian yang terjadi dalam disiplin ilmu politik dan pemerintahan.

Terlebih lagi pengambilan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar penulis dapat memberikan informasi berupa gambaran peran Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dengan fokus peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik secara aktual dan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Gerejawi yakni Keuskupan Agung Semarang terutama pada pejabat struktural Keuskupan itu sendiri. Fokus utama penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber terkait yakni Mgr. Albertus Rubyatmoko selaku Uskup Agung Semarang. Penelitian ini juga mengulas fenomena sosial dan hambatan apa saja yang dialami Bapa Uskup dalam peran dan kiprahnya guna meningkatkan partisipasi Umat Katolik di Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2016:26). Namun, subjek penelitian juga diartikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:32).

Sehingga melalui penjabaran diatas, penulis menyeleksi secara individu informan untuk diwawancarai atau diobservasi dengan tujuan didapatkannya informasi yang relevan dan memahami kondisi atau siklus seperti apa yang bergulir di masa saat ini. Dengan demikian, maka narasumber atau subjek penelitian yang berkaitan dengan peran Pastor Kepala Keuskupan Agung dalam peningkatan partisipasi Pemuda Katolik di Kota Semarang, sebagai berikut;

1. Mgr. Robertus Rubiyatmoko, selaku Uskup Agung Semarang atau yang mewakili Pastor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
2. Romo FX. Endra Wijayanto, Pr, sebagai Pastor Bidang Sosial, Politik, Advokasi dan Kemasyarakatan di Unit Pengembangan Pastoral Keuskupan Agung Semarang (UPP-KAS),
3. Ignatius Heri Budi Susilo, A.Md.Psi, selaku Kepala Bidang 3 Kemasyarakatan Gereja Santo Petrus Sambiroto,
4. Rochni Urip Widodo, S.E, selaku Koordinator Tim Pelayanan Karya Kerasulan Kemasyarakatan Gereja Santo Petrus Sambiroto sekaligus perwakilan Umat Katolik di lingkungan Gerejawi,
5. Medafa Arung Palaga, S.IP, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Semarang.

1.8.4 Data Penelitian

Data yang diambil dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan daripada sumber-sumber terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literasi yang didapatkan dari buku cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik atau tema ini, dan laman website. Sehingga, peneliti

menjabarkan kedua data tersebut, sebagai berikut.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan upaya pengambilan data di lapangan secara langsung (Sugiyono, 2010). Sehingga berkaitan dengan data primer ini, maka data yang didapatkan dengan wawancara dan pengamatan atau observasi lapangan dengan sumber terkait. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam dengan para informan atau narasumber yang telah menjadi subjek penelitian peran Pastor Kepala Keuskupan Agung dalam peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik di Kota Semarang.

1.8.4.2 Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder ini diperoleh dari beberapa literasi yang diambil dari buku cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik dan tema yang sesuai serta laman website. Seluruh literasi dan studi pustaka penelitian ini akan bersangkutan dengan topik dan tema peran Uskup Agung dalam peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik di Kota Semarang.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber untuk mendapatkan jawaban sebagai data dan jawaban penelitian. Mengutip buah pikir Moleong (2018), beliau memaparkan bahwa wawancara merupakan dialog dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee). Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung (offline) dengan narasumber atau informan yang dirasa memiliki konsen lebih kepada peran Bapa Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiyatmoko dalam proses peningkatan partisipasi politik organisasi kemasyarakatan Pemuda Katolik di Kota Semarang.

1.8.5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, berupa pengamatan langsung dan riset yang mendalam terkait subjek atau objek penelitian, kemudian peneliti mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan mendalam tersebut. Menurut Sugiyono (2018:229), observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik observasi akan dilakukan peneliti guna menunjang penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan observasi secara langsung di Otoritas Keuskupan Agung Semarang.

1.8.5.3 Dokumentasi

Menurut Moloeng (2018) Dokumen adalah suatu catatan atau karya yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian, dalam situasi sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik dokumentasi yang penulis maksudkan adalah dengan mengambil beberapa publikasi publikasi dari kegiatan wawancara dan observasi dalam penelitian peran Uskup Agung Semarang Monsinyur

Robertus Rubiyatmoko dalam peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik di Kota Semarang. Selain itu, dokumentasi juga diambil dari situs literasi milik Otoritas Keuskupan Agung Semarang.

1.8.5.4 Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari beberapa literasi yang didapatkan dari media cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik atau tema, dan laman tertentu. Seluruh literasi dan studi pustaka penelitian ini akan bersangkutan dengan topik dan tema peran Bapa Uskup dalam peningkatan partisipasi politik Pemuda Katolik di Kota Semarang.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam Buku Sugiyono (2015) Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa kegiatan analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga data tersebut tuntas. Kegiatan analisis dan interpretasi data terbagi dalam; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.8.6.1 Reduksi Data

Sugiyono (2015) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola sekaligus menyeleksi data yang tidak penting. Mereduksi data adalah proses menyeleksi dan mengolah data agar lebih tajam dan akurat, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dapat tercakup, terukur, dan terfokus. Sehingga sangat penting adanya tahapann reduksi data untuk mencapai tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.8.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dimana peneliti menjabarkan data-

data yang telah diperoleh dan direduksi. Peneliti akan mendiskripsikan penelitiannya dalam bentuk uraian singkat atau\panjang, gambar, tabel, atau sejenisnya.untuk menjelaskan penelitiannya. Dalam penyajian data, penulis juga menjelaskan korelasi permasalahan, topik, dan tema penelitian dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, hal ini menunjukkan adanya ketersinambungan dengan operasionalisasi konsep penelitian terhadap teori yang digunakan, sehingga penyajian data dapat menjadi terukur dan terarah.

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh peneliti setelah melalui tahap penyajian data. Kesimpulan dan verifikasi merupakan prosesi kesinambungan dari permasalahan dan topik penelitian dengan bukti dan data-data yang ditemukan di lapangan. Biasanya penarikan kesimpulan dan verifikasi ini dapat menjawab rumusan masalah awal peneliti yang telah ditentukan. Dalam tahapan ini terdapat kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dapat terjadi dalam penelitian masih ditemukan data pendukung yang relevan, sehingga seorang peneliti diharuskan memverifikasi kembali data tersebut dengan permasalahan yang terjadi. Sedangkan kesimpulan akhir terjadi ketika tahapan kesimpulan sementara telah usai dan didukung data-data valid yang relevan dan terperinci serta cukup menjawab rumusan masalah.